



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
Jabatan : Kepala Biro Persidangan II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

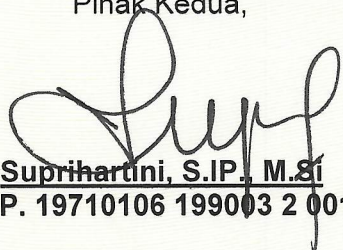
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

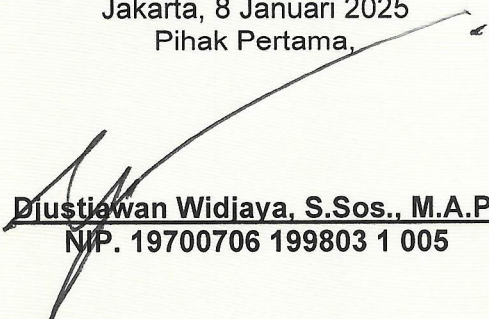
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Suprihartini, S.IP., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001


Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19700706 199803 1 005



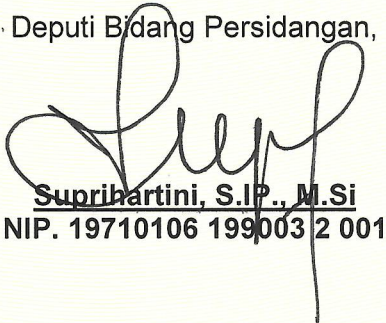
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, Kerumahtangaan dan Penegakan Etik DPR	1. Jumlah Penetapan Prolegnas	2 Rekomendasi
		2. Jumlah kegiatan sosialisasi UU yang dilaksanakan	1160 Kegiatan
		3. Jumlah Penyusunan dan Pembahasan RUU Usul DPR	6 RUU
		4. Jumlah Pembahasan RUU Usul Pemerintah	11 RUU
		5. Jumlah Pembahasan RUU Kumulatif Terbuka	14 RUU
2.	Tersedianya APBN bagi penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola	1. Jumlah rekomendasi kebijakan anggaran mitra kerja DPR RI	49 rekomendasi
3.	Terselenggaranya Fungsi Pengawasan DPR terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil pengawasan	5 rekomendasi
4.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan Badan Mahkamah dan Panitia Khusus	1. Persentase skenario, administrasi pengaduan, laporan singkat persidangan dan dukungan rapat Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan II	3,35
		3. Nilai IKPA Mini Biro Persidangan II	96
		- Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	9,60 19,20 24,00 14,40 28,80
4.	Persentase Realisasi Anggaran	98%	

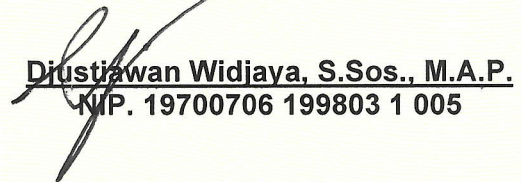


Program	Anggaran
Satker Dewan	Rp178.908.419.000,00
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI dan Alat Kelengkapan Dewan	Rp178.908.419.000,00
Satker Setjen	Rp2.937.541,000.00
Program Dukungan Manajemen	Rp2.937.541,000.00

Deputi Bidang Persidangan,


Suprihartini, S.IP., M.Si
NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 8 Januari 2025
Kepala Biro Persidangan II,


Djusriawan Widjaya, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19700706 199803 1 005

